



# Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Sosialisasi Program Pengendalian Penduduk

Diya Kurnia Meilia Aslim<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

\*Corresponding author

E-mail addresses: [diyakurniama04@gmail.com](mailto:diyakurniama04@gmail.com)

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received December 29, 2025

Revised June 03, 2026

Accepted June 05, 2026

Available online June 05, 2026

### Kata Kunci:

pemberdayaan Masyarakat;  
pengendalian penduduk; sosialisasi;  
Dinas P3AKB.

### Keywords:

community empowerment; population control; socialization; P3AKB Service.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

## ABSTRAK

Tingkat pertumbuhan populasi yang terus melonjak dan kesadaran masyarakat yang masih minim terkait pentingnya mengatur jumlah anggota keluarga menjadi masalah yang masih dihadapi di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu, pemerintah setempat perlu aktif dalam membangun kapasitas masyarakat melalui program-program yang berkelanjutan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo memiliki peranan penting dalam menyebarkan informasi tentang program pengendalian populasi kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Dinas P3AKB Sidoarjo mendukung masyarakat melalui kegiatan sosialisasi program pengendalian populasi. Penelitian ini menggunakan Model Implementasi Kebijakan dari George C. Edwards III, mengingat tingginya angka kelahiran dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengendalian populasi serta penundaan usia menikah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan selama melaksanakan program magang di bidang pengendalian populasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas P3AKB berfungsi

sebagai fasilitator, pengajar, dan pendorong dalam meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat mengenai isu kependudukan.

## ABSTRACT

The ever-increasing population growth rate and the still-low public awareness regarding the importance of managing family size are ongoing problems faced in various regions, including Sidoarjo Regency. Therefore, local governments need to actively build community capacity through sustainable programs. The Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning (P3AKB) Office of Sidoarjo Regency plays a crucial role in disseminating information about population control programs to the community. This study aims to examine how the P3AKB Office of Sidoarjo supports the community through population control program outreach activities. This study uses the Policy Implementation Model by George C. Edwards III, considering the high birth rate and low public understanding of the importance of population control and delaying marriage age. The method used is a descriptive qualitative method with a field study approach during the internship program in the field of population control. The results show that the P3AKB Office functions as a facilitator, educator, and motivator in increasing public awareness and participation regarding population issues.

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia dan terus mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahun. Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), diprediksi bahwa jumlah penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 286,7 juta orang pada pertengahan tahun 2025, menunjukkan adanya pola pertumbuhan penduduk yang konsisten.

Peningkatan jumlah penduduk tersebut menimbulkan berbagai implikasi penting yang perlu mendapat perhatian serius. Apabila tidak dikelola secara optimal, pertumbuhan penduduk dapat memperbesar tekanan terhadap kondisi sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya kebutuhan pangan, ketimpangan ekonomi, serta persaingan di sektor ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk menyusun perencanaan pembangunan yang seimbang melalui penyediaan sarana, prasarana, dan infrastruktur yang memadai. Selain itu, peningkatan kualitas layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial menjadi tantangan utama agar laju pertumbuhan penduduk tidak berdampak negatif terhadap pembangunan nasional.

Pemberdayaan perempuan merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup serta peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini ditegaskan dalam literatur bahwa pemberdayaan perempuan adalah proses peningkatan akses terhadap sumber daya, kemampuan mengambil keputusan, serta peningkatan kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan hidup, termasuk dalam konteks kesetaraan gender. (Reni Safitri, & Mafruhat, A. Y. (2022)). Selain itu, kesetaraan gender dan pengarusutamaan perempuan merupakan masalah penting dalam pembangunan sumber daya manusia karena perempuan sering mengalami ketidakadilan dalam hal kesempatan, keterlibatan, pengambilan keputusan, dan manfaat yang diperoleh dari Pembangunan dalam berbagai sektor seperti pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Ministry of Women's Empowerment Dengan adanya pemberdayaan, perempuan tidak hanya dapat meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi tetapi juga berkontribusi secara lebih maksimal dalam kehidupan sosial dan pembangunan masyarakat. Oleh sebab itu, upaya pemberdayaan perempuan memiliki peranan vital dalam mendorong terciptanya kesetaraan gender, meningkatkan kemampuan dan kemandirian perempuan, serta menyediakan lingkungan yang memungkinkan mereka berkontribusi secara maksimal bagi masyarakat. Melalui berbagai program pemberdayaan, perempuan diharapkan dapat memperoleh keterampilan, rasa percaya diri, serta akses yang lebih luas terhadap sumber daya agar mampu mengaktualisasikan hak dan potensinya secara optimal.

Program Keluarga Berencana (KB) yaitu salah satu upaya utama pemerintah yang bertujuan dalam mengatur laju pertumbuhan jumlah penduduk. Program ini dianggap berhasil dalam menurunkan angka kelahiran. dan juga membantu dalam pengaturan jumlah penduduk. Program ini dibuat untuk mendukung pembentukan keluarga kecil yang terencana dan makmur (Ari, 2020). Selain berfungsi dalam mengatur populasi, program Keluarga Berencana juga bertujuan dalam menurunkan angka kematian ibu dan meningkatkan kualitas kesehatan keluarga.

Keberhasilan dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat bukanlah tanggung jawab pemerintah saja, namun juga membutuhkan kontribusi aktif dari masyarakat itu sendiri (Basyar et al. Tentu saja, namun tampaknya Anda

hanya memberikan data tahun. Mohon berikan informasi atau teks lengkap yang ingin Anda parafrasekan agar saya dapat membantu Anda lebih lanjut. Dalam rangka meningkatkan dan melakukan inovasi pada program keluarga berencana, pemerintah memperkenalkan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dengan terdapat tujuan untuk memperkuat kemandirian ekonomi bagi keluarga yang mengikuti program KB. Kota Surabaya adalah salah satu daerah dengan sudah menjalankan program UPPKA, karena masalah kemiskinan tetap menjadi tantangan yang tampak dari kesulitan sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik berupa makanan maupun kebutuhan lainnya.

Program pengendalian penduduk tidak hanya bertujuan untuk menurunkan angka kelahiran, tetapi juga berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat agar dapat memahami, merancang dan mengambil keputusan yang benar serta bertanggung jawab tentang kehidupan keluarga dan masa depan generasi mendatang. Dalam situasi ini, kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) memiliki peran yang signifikan sebagai media untuk pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan metode komunikasi yang meyakinkan, adaptif, dan sesuai dengan karakter serta kebutuhan masing-masing daerah, sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, keterlibatan, serta komitmen masyarakat dalam mendukung. Pelaksanaan program pengendalian penduduk yang berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; BKKBN, 2020).

Jika jumlah penduduk terus meningkat tanpa adanya pengelolaan, sehingga mampu terdapat berbagai permasalahan yang akan memengaruhi aspek sosial dan ekonomi pada masyarakat. Keadaan ini mendorong pemerintah untuk lebih mempertimbangkan berbagai aspek dalam merumuskan kebijakan, khususnya yang terkait dengan penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, serta kebijakan krusial untuk mengendalikan laju pertumbuhan populasi. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah menjalankan Program Keluarga Berencana (KB) yang diatur oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMPKB). Program ini dibuat dalam mengontrol pertumbuhan populasi melalui upaya mengatur jumlah kelahiran melalui pembatasan jumlah anak pada setiap keluarga dengan terencana juga menyeluruh, dengan demikian diharapkan dapat menurunkan angka kelahiran yang masih tergolong tinggi (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; BKKBN, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kependudukan diartikan sebagai segala sesuatu yang terkait dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, distribusi, mobilitas, kualitas, serta kondisi kesejahteraan penduduk. Hal ini mencakup beberapa aspek dalam ekonomi, politik, sosial, budaya, agama, juga lingkungan. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut, sudah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 yang mengatur tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta tujuan dari pelaksanaan program Keluarga Berencana. Dalam menjalankan tugas yang ditetapkan oleh regulasi tersebut, pemahaman serta pandangan yang seragam antara Dinas, Badan, dan Instansi pemerintah di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta semua pemerintah kabupaten/kota sangatlah penting. Oleh karena itu, pelaksanaan sosialisasi program Keluarga Berencana menjadi sangat penting. Selain itu, agar masyarakat lebih mudah

mengakses layanan Keluarga Berencana (KB), sangat penting dalam memperkuat kolaborasi dengan sejumlah pihak, diantaranya pemerintah, sektor swasta, serta memberikan dukungan yang cukup dari Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti jumlah PLKB yang terbatas, kurangnya inovasi dalam pelaksanaan sosialisasi, serta tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang mempengaruhi meningkatnya kebutuhan yang belum dapat dipenuhi. Situasi ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai usia yang tepat untuk menikah, usia ideal untuk melahirkan, serta pengaturan jarak kelahiran. Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan kenaikan angka kelahiran, Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Ibu (AKI), dengan demikian mampu menghalangi upaya dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara maksimal (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010; BKKBN, 2020).

Artikel ini disusun untuk menyajikan penjelasan yang terang mengenai fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo dalam mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan sosialisasi program pengendalian penduduk. Selain itu, artikel ini juga menilai seberapa efektif strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan program tersebut. Diskusi dalam artikel ini mencakup berbagai elemen yang memfasilitasi maupun menghalangi keberhasilan program, sehingga temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penilaian dan rekomendasi dalam meningkatkan mutu kebijakan serta praktik pengendalian populasi di masa mendatang. Melalui penelitian ini, diharapkan akan terbentuk pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai pembangunan keluarga yang sejahtera dan berkelanjutan.

## **2. METODE**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dekriptif dalam menyampaikan penjelasan mendalam terkait fenomena yang sebagai fokus perhatian penelitian. Pengumpulan data dilaksanakan melalui cara observasi langsung selama masa magang di Bidang Pengendalian Penduduk Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo, wawancara tidak terstruktur dengan staf yang berhubungan, serta pengumpulan dokumentasi yang meliputi kegiatan sosialisasi, administrasi, beserta arsip data dan laporan pertanggungjawaban (SPJ). Analisis data dilaksanakan melalui beberapa tahap, yang mencakup pengurangan data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan menurut informasi yang telah berhasil didapatkan. Sumber informasi yang dimanfaatkan untuk penelitian ini tersusun atas data utama serta data tambahan.

Informasi utama didapatkan dari sumber utama, yaitu Kepala Bidang Keluarga Berencana, serta hasil pengamatan di lapangan dan catatan wawancara yang mencerminkan keadaan dan peristiwa yang terjadi selama pelaksanaan penelitian. Sementara itu, informasi sekunder diperoleh dari berbagai dokumen yang mendukung, termasuk buku profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo, buku sosialisasi program kerja, serta arsip resmi dari lembaga yang relevan. Metode analisis data yang digunakan

berorientasi pada proses pemangkasan data sebagai usaha untuk menyederhanakan dan mengutamakan informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam menganalisis pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III berfokus terhadap empat faktor penting, diantaranya komunikasi, sikap pelaksana, sumber daya, dan struktur birokrasi.

Dalam pelaksanaan program, elemen komunikasi memiliki peranan penting dalam menjamin bahwa pesan, tujuan, dan manfaat program dapat dipahami dengan baik oleh perempuan yang menjadi sasaran. Keberadaan sumber daya, termasuk sumber daya manusia, anggaran, serta fasilitas pendukung, terdapat fungsi dengan sangat penting dalam menentukan keberlangsungan dan kesuksesan program. Selain itu, sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan memberikan pengaruh besar terhadap keberhasilan program, khususnya dalam mendukung peningkatan kapasitas serta kemandirian perempuan. Sistem birokrasi yang teratur dan efisien berperan penting dalam memfasilitasi koordinasi antara unit kerja dan mempercepat proses pelayanan. Dengan demikian, program pemberdayaan perempuan dapat dilaksanakan secara maksimal dan sesuai dengan sasaran yang ditentukan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***Hasil***

#### **Analisis**

Pengawasan merupakan elemen krusial dalam pelaksanaan kebijakan publik untuk memastikan bahwa program yang diimplementasikan sejalan dengan tujuan yang telah ditentukan. Dalam rangka memperkuat komunitas melalui penyuluhan mengenai program pengendalian penduduk, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo melaksanakan pengawasan untuk menjamin bahwa program tersebut berlangsung dengan efektif dan berkelanjutan. Pengawasan dilaksanakan dengan cara memantau pelaksanaan sosialisasi, menilai hasil program, serta menjalin koordinasi antarinstansi agar informasi dan tujuan kebijakan dapat disampaikan dengan akurat kepada masyarakat. Berdasarkan teori pelaksanaan kebijakan yang diusulkan oleh George C. Edwards III menyatakan mengenai pengawasan erat kaitannya dengan komunikasi dan struktur birokrasi, di mana kejelasan informasi dan mekanisme kerja yang teratur dapat mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal (Edwards III, 1980). Melalui pengawasan yang berkelanjutan, Dinas P3AKB dapat mengidentifikasi kendala di lapangan dan menyesuaikan strategi sosialisasi. Dengan demikian, upaya pemberdayaan masyarakat untuk mendukung program pengendalian penduduk dapat berjalan dengan lebih efisien dan tepat sasaran.

#### **Penyelenggara Pemerintah dalam Program keluarga berkualitas melalui pendidikan kependudukan**

Pemerintahan yang efektif bertujuan dalam menunjukkan pelayanan publik secara maksimal. Kualitas pelayanan publik yang baik mencerminkan bahwa pengelolaan pemerintahan dilakukan secara efektif, sedangkan pelayanan yang kurang baik menunjukkan bahwa sistem pemerintahan masih memerlukan perbaikan. Konsep pengelolaan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan

penerapan hukum dan peraturan, tetapi juga mencakup penerapan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang melibatkan kerja sama antara peran birokrasi internal dan eksternal (Tahir, 2017).

Penelitian mengindikasikan bahwa pihak penyelenggara pemerintah terdapat peran dengan sangat utama untuk mewujudkan program keluarga berkualitas melalui pelaksanaan pendidikan mengenai kependudukan.

Pemerintah, melalui lembaga yang berhubungan di tingkat daerah, memiliki peran sebagai perancang, pelaksana, dan pendukung dalam menyampaikan informasi tentang kependudukan kepada masyarakat. Pendidikan kependudukan tidak hanya menitikberatkan terhadap pengendalian jumlah penduduk, namun juga terdapat tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, juga pentingnya pembangunan keluarga yang berkelanjutan. Dalam penjelasannya, peran pemerintah tampak melalui pembuatan kebijakan, penyediaan sumber daya, serta pelaksanaan sosialisasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Penemuan ini menunjukkan bahwa pendidikan kependudukan adalah alat penting untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat, sehingga dapat terwujudnya keluarga yang berkualitas. Dengan adanya koordinasi antarinstansi dan partisipasi aktif dari masyarakat, program ini mampu memberikan kontribusi pada peningkatan mutu sumber daya manusia serta penguatan ketahanan keluarga yang merupakan bagian dari pembangunan kependudukan yang berkelanjutan. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana menjalankan berbagai kegiatan Keluarga Berencana (KB) secara proaktif dalam berbagai peringatan dan kegiatan strategis yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat di tingkat desa atau kecamatan, tetapi juga dilakukan dalam berbagai kesempatan khusus, seperti peringatan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo, Hari Kartini, Hari Ibu, maupun peringatan yang lain. Hal tersebut membuktikan mengenai instansi terkait secara berkesinambungan melaksanakan sosialisasi mengenai program keluarga berencana, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi juga termotivasi untuk ikut serta dalam program tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan program KB dapat berlangsung dengan optimal dan terealisasi dengan baik.

Agar dapat mengontrol pertumbuhan populasi, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana menyusun serta melaksanakan Program Keluarga Berencana dengan menggunakan pendekatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Sosialisasi program ini dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, meliputi KB-Kesehatan, penyuluhan KB dalam rangka Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat, penyuluhan KB secara serentak untuk memperingati Hari Keluarga, penyuluhan KB dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Korpri, Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo, serta kegiatan penyuluhan KB pada saat merayakan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita. Selain itu, layanan Keluarga Berencana (KB) juga dijalankan dalam program Sidoarjo Siap 24 Jam guna menciptakan keluarga yang berkualitas, serta dalam rangka merayakan Hari Kartini dan Hari Ibu. Dengan memperhatikan situasi tersebut, pelaksanaan program keluarga berencana di Kabupaten Sidoarjo mencerminkan penerapan konsep pelaksanaan kebijakan yang diungkapkan oleh George C. Edward III menekankan pentingnya kejelasan dalam

kebijakan, komunikasi antar organisasi, serta dukungan lingkungan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan publik.

#### 1. Komunikasi

Komunikasi pada Program Keluarga Berencana di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana dilakukan melalui menerapkan metode Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Walaupun telah merujuk pada peraturan yang ada, hasil kinerja yang dicapai oleh BPMPKB Kabupaten Sidoarjo masih belum seoptimal yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh sosialisasi yang belum dilakukan secara merata, adanya kendala dalam penyampaian informasi, serta layanan publik yang belum sepenuhnya sejalan dengan visi dan misi lembaga, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berpartisipasi, mengedepankan keadilan gender, dan membangun keluarga yang berkualitas serta sejahtera.

#### 2. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian populasi melalui Program Keluarga Berencana di BPMPKB meliputi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), serta Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD). Meskipun demikian, jumlah tenaga kerja manusia yang tersedia masih tidak mencukupi, karena satu orang PLKB ditugaskan untuk satu desa, sementara standar idealnya adalah setiap desa memerlukan dua orang PLKB. Dalam hal pendanaan, program ini masih bergantung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa adanya bantuan dana tambahan. Untuk mendukung pelaksanaan program dengan lebih baik. Selain itu, bantuan untuk fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan meliputi sistem audio, materi presentasi, peralatan medis seperti tensiometer dan jarum suntik, alat kontrasepsi, serta media pendukung seperti banner dan spanduk.

#### 3. Disposisi

Aspek sikap dalam pelaksanaan kebijakan dilaksanakan melalui meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) melalui penyuluhan tentang kesehatan reproduksi bagi remaja. Selain itu, inisiatif ini juga menitikberatkan pada peningkatan partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) sebagai peserta dalam Program Keluarga Berencana (KB) dalam menciptakan keluarga kecil secara harmonis juga sejahtera. Penguatan kapasitas kader dalam lembaga masyarakat untuk mengelola program Keluarga Berencana (KB) di daerah pedesaan bertujuan agar angka kebutuhan KB yang belum terpenuhi dapat berkurang dan jumlah peserta KB yang mundur dapat menurun. Perluasan kegiatan penyuluhan dan konseling di berbagai layanan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kepuasan PUS terhadap pemakaian alat kontrasepsi, serta mengurangi risiko efek samping, komplikasi, serta kegagalan dalam penggunaan kontrasepsi. Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui Program Keluarga Berencana telah mencapai hasil yang memuaskan, apabila diketahui pada jumlah Peserta Aktif Semua Metode (PASM). Akan tetapi, ada beberapa metode kontrasepsi, seperti Metode Operasi Pria (MOP) serta penggunaan kondom, yang belum mencapai target yang diharapkan dan menunjukkan kecenderungan menurun.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo telah ditentukan secara tegas melalui Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana serta Keluarga Sejahtera. Ketentuan ini memberikan petunjuk yang jelas dalam pembagian tanggung jawab dan kekuasaan, sehingga mendukung pelaksanaan program keluarga berencana dengan lebih terarah dan terpadu.

#### **Pelaksanaan Sosialisasi**

Menurut MacIver, sosialisasi adalah suatu proses di mana individu belajar tentang norma, nilai-nilai, peran, juga berbagai aturan yang lain dengan dibutuhkan dalam berkontribusi dengan baik dalam kehidupan sosial (Kerja, 2017). Peneliti mengevaluasi hasil wawancara dengan merujuk pada teori peran yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto (2002:243), yang menjelaskan mengenai peran adalah aspek yang berubah-ubah dari posisi atau status sebuah individu. Seseorang dinyatakan menjalankan perannya jika ia mampu memenuhi hak dan tanggung jawab yang terkait dengan posisinya. Selain itu, analisis ini juga sejalan dengan pandangan mengenai peran pemerintah yang disampaikan oleh Sondang P. Siagian dalam bukunya yang bertajuk Administrasi Pembangunan (2009:132), yang menyebutkan bahwa fungsi pemerintah dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti pengaturan, pembuatan kebijakan, layanan publik, penegakan hukum, serta menjaga ketertiban dan keamanan. Dengan memahami kedua teori ini, kita dapat menginferensikan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana terdapat peran dengan sangat utama untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan pengaturan melalui aktivitas sosialisasi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat.

Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kegiatan Program keluarga berkualitas melalui pendidikan kependudukan adalah memberikan sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang tertarik menjadi pelaku usaha. Kegiatan pembinaan Program keluarga berkualitas melalui pendidikan kependudukan ini dilaksanakan dengan target peserta berupa keluarga yang tergolong akseptor KB, yang tersebar di beberapa RW dalam lingkup Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, setelah melalui tahap assegment untuk menentukan peserta yang layak mengikuti agenda pelatihan dalam kurun waktu Bulan Juni sampai September 2025. Pembinaan dilakukan selama 13 sampai 17 pertemuan dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan, sedangkan sisanya dalam waktu satu tahun berupa evaluasi atau pendampingan untuk memantau perkembangan kelompok Program keluarga berkualitas melalui pendidikan kependudukan. Dalam melaksanakan pembinaan, masyarakat secara positif menerima kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Program Keluarga Berkualitas melalui Pendidikan Kependudukan dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi salah satu upaya intervensi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini bertujuan mendorong

peningkatan kualitas hidup keluarga dengan memberikan pendidikan kependudukan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya keluarga yang sebelumnya belum memiliki kemampuan ekonomi mandiri. Melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, masyarakat dimotivasi untuk mengembangkan potensi diri serta membangun usaha secara mandiri agar dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan demikian, program ini tidak hanya berperan dalam upaya mengurangi kemiskinan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi perempuan, khususnya ibu rumah tangga, untuk terlibat aktif dalam mendukung perekonomian keluarga serta memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Program Keluarga Berkualitas melalui Pendidikan Kependudukan yang berlangsung di Kabupaten Sidoarjo terbukti mampu mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui peningkatan pendapatan keluarga.

Upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut diwujudkan dengan pendirian rumah kreatif yang berfungsi sebagai tempat pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat. Rumah kreatif ini tidak hanya ditemukan di Kabupaten Sidoarjo saja, tetapi juga telah dikembangkan di berbagai kecamatan lainnya, sehingga program ini mampu menjangkau lebih banyak masyarakat dan meningkatkan dampak pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan..

Pemerintah Kota Surabaya menghadapi beberapa hambatan dalam mendorong pelaksanaan Program Keluarga Berkualitas melalui Pendidikan Kependudukan, yang juga menjadi pertimbangan dalam menentukan solusi kebijakan. Masalah utama yang dihadapi adalah kesulitan dalam memahami ciri-ciri masyarakat yang kurang mampu atau belum sejahtera, sehingga diperlukan pendekatan khusus untuk membangun kapasitas mereka. Selain itu, masih ada anggapan dari sebagian masyarakat bahwa keterlibatan pemerintah hanya berupa pemberian bantuan tunai. Pandangan ini menghalangi pelaksanaan program berbasis edukasi dan pemberdayaan, sehingga diperlukan sosialisasi serta pendampingan yang berkelanjutan agar masyarakat memahami tujuan program sebagai sarana peningkatan keterampilan dan kemandirian keluarga.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah telah merancang beberapa langkah.

Salah satunya merupakan menunjukkan edukasi pada masyarakat terkait manfaat partisipasi dalam program tersebut, sehingga mereka dapat lebih produktif dan berkembang, terutama di bidang pengolahan makanan yang berpotensi meningkatkan perekonomian keluarga. Selain itu, pemerintah berupaya mengubah pola pikir masyarakat yang masih menganggap intervensi pemerintah hanya berupa pemberian uang tunai. Untuk itu, pihak pemerintah memberikan pemahaman kepada peserta program bahwa peran pemerintah tidak hanya sekadar menyalurkan bantuan, melainkan lebih pada pemberian edukasi, pelatihan, dan bimbingan untuk membangun kemandirian dan keberlanjutan ekonomi keluarga.

### **Pembinaan Kemasyarakatan**

Menurut Mitha Thoha, pembinaan adalah sebuah usaha yang mencakup tindakan, proses, hasil, serta pernyataan dengan terdapat tujuan untuk memperoleh keadaan secara lebih maksimal. Pembinaan mencerminkan adanya perkembangan, peningkatan, pertumbuhan, serta kesempatan untuk maju dari suatu

keadaan tertentu. Dalam definisi pembinaan terdapat dua elemen penting, yang pertama adalah pembinaan sebagai rangkaian tindakan atau proses dalam mencapai tujuan tertentu, sedangkan yang kedua adalah pembinaan yang memperlihatkan adanya perbaikan atau kemajuan terhadap hal yang dibina (Zamrodah, 2016).

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan bimbingan dan dukungan pemasaran kepada peserta Program Keluarga Berkualitas melalui Pendidikan Kependudukan dengan kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk memotivasi dan memperkuat masyarakat sasaran. Selain itu, pemerintah menyediakan akses terkait manajemen usaha, teknik pemasaran, pengemasan produk, legalitas usaha, serta pengembangan inovasi produk. Melalui pendampingan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo telah menjalankan perannya sebagai pendamping selaras terhadap indikator yang sudah ditentukan.

Dalam pelaksanaannya, program ini memfokuskan pada partisipasi masyarakat dalam pelatihan dan pendampingan sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan keluarga, terutama bagi keluarga akseptor, sehingga dapat membantu perekonomian rumah tangga. Pelatihan dan pendampingan berfungsi membantu peserta dalam memulai, mengembangkan, dan meningkatkan usaha yang ada. Selain itu, peserta program mendapatkan akses informasi dan kuota untuk ikut serta dalam bazar di tingkat kota maupun provinsi, serta memberikan ruang promosi supaya bisnis yang mereka kelola bisa terus maju. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga memberikan dukungan tambahan melalui kebijakan pengadaan yang mendukung produk dari UMKM binaan, termasuk pelaku usaha yang terdaftar dalam program dan sudah terdaftar di platform E-Peken yang diluncurkan oleh pemerintah daerah.

Masyarakat merasakan berbagai keuntungan dari pelaksanaan Program Keluarga Berkualitas melalui Pendidikan Kependudukan, seperti peningkatan pengetahuan tentang pemasaran, pengemasan produk, dan kemampuan untuk mengembangkan usaha secara lebih luas. Selain itu, peserta juga mendapatkan pengalaman dalam memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman dengan variasi produk yang memiliki nilai jual. Usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan keluarga sejahtera melalui kegiatan ekonomi keluarga diimplementasikan melalui pelatihan yang ditujukan bagi keluarga kurang mampu secara teratur dan berkelanjutan. Materi pelatihan disesuaikan dengan minat dan keterampilan masyarakat, sehingga program mampu berlangsung dengan efektif juga menunjukkan pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga.

### **Faktor-faktor yang Mendorong dan Menghalangi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Sidoarjo:**

Kekuatan yang mendukung BPMPKB Kabupaten Sidoarjo terlihat dari beberapa poin penting, yaitu:

1. Masyarakat semakin menyadari betapa pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilakukan melalui edukasi kesehatan reproduksi untuk remaja.
2. Ada peningkatan dalam partisipasi serta perhatian dari Pasangan Usia Subur (PUS) sebagai peserta program keluarga berencana, yang bertujuan untuk mencapai keluarga kecil yang sejahtera.

3. Kemampuan dan keterampilan kader organisasi masyarakat dalam mengelola program KB di desa semakin meningkat, yang berdampak positif dalam menurunkan jumlah unmet need serta peserta KB yang keluar dari program.
4. Jumlah penyuluhan dan layanan konseling KB di berbagai tempat pelayanan semakin meningkat, yang dapat meningkatkan kepuasan PUS dalam menggunakan alat kontrasepsi serta mengurangi risiko efek samping, komplikasi, atau kegagalan dalam penggunaan kontrasepsi. Faktor yang menghalangi pelaksanaan kebijakan kontrol pertumbuhan populasi di Kabupaten Sidoarjo.

Tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ini mencerminkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB). Berbagai tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Jumlah petugas di lapangan untuk penyuluhan keluarga berencana (PLPKB) yang cenderung menurun.
2. Tanggung jawab kerja para petugas lapangan semakin meningkat karena struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan berhubungan terhadap bidang keluarga berencana di Kabupaten Sidoarjo masih berhubungan terhadap urusan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana, sehingga tugas yang harus dijalani menjadi lebih rumit.
3. Partisipasi pria dalam program keluarga berencana masih tergolong rendah, terutama terkait metode Medis Operasi Pria (MOP), hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat yang kuat bahwa pelaksanaan program tersebut adalah tanggung jawab perempuan.
4. Peserta aktif dalam program keluarga berencana sebagian besar masih menggunakan metode kontrasepsi suntik, karena masyarakat cenderung memilih layanan keluarga berencana yang mudah, praktis, dan dapat diakses dekat dengan tempat tinggal mereka. Selain itu, angka pertumbuhan penduduk yang pesat di Kabupaten Sidoarjo menjadi sebuah tantangan unik karena dapat meningkatkan jumlah kebutuhan yang belum terpenuhi.

Untuk mengatasi berbagai faktor yang mendukung dan menghambat, pelaksanaan kebijakan pengendalian pertumbuhan populasi melalui program keluarga berencana di BPMPKB Kabupaten Sidoarjo membutuhkan dukungan juga komitmen secara kuat dari pemimpin daerah, termasuk Bupati legislator, maupun internal organisasi. Langkah-langkah yang bisa diambil meliputi penguatan dan pengembangan struktur organisasi, peningkatan kualitas serta jangkauan pelaksanaan program KB dengan menambah jumlah petugas lapangan keluarga berencana, memperluas kemitraan untuk meningkatkan jaringan sosialisasi, serta mengintensifkan penyuluhan tentang program KB bagi pria, terutama yang berkaitan dengan metode Medis Operasi Pria (MOP).

### ***Pembahasan***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi program

pengendalian penduduk. Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi sebagai fasilitator, edukator, motivator, dan pendamping masyarakat dalam meningkatkan kesadaran mengenai kependudukan, kesehatan reproduksi, serta pentingnya perencanaan keluarga. Temuan ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang menekankan peningkatan kapasitas individu dan kelompok agar mampu mengambil keputusan secara mandiri dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dan pembangunan (Ife & Tesoriero, 2014).

Berdasarkan perspektif implementasi kebijakan George C. Edwards III, keberhasilan pelaksanaan program pengendalian penduduk dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada aspek komunikasi, Dinas P3AKB telah menerapkan pendekatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dalam menyampaikan program kepada masyarakat. Pendekatan ini penting karena keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menyampaikan tujuan dan manfaat program kepada kelompok sasaran secara jelas dan konsisten (Edwards III, 1980). Melalui berbagai kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada momentum tertentu, seperti Hari Keluarga Nasional, Hari Kartini, dan kegiatan masyarakat lainnya, informasi mengenai keluarga berencana dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa distribusi informasi belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan komunikasi yang berpotensi memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria dan Riyadh (2024) yang menyatakan bahwa efektivitas program kependudukan sangat dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi serta kemampuan petugas lapangan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan media digital dan platform komunikasi berbasis teknologi menjadi alternatif yang dapat meningkatkan jangkauan sosialisasi, terutama kepada kelompok usia muda yang merupakan sasaran penting dalam program pendewasaan usia perkawinan.

Pada aspek sumber daya, penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), dan Sub PPKBD menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi program. Namun demikian, jumlah tenaga yang tersedia masih belum ideal dibandingkan dengan luas wilayah pelayanan. Keterbatasan sumber daya manusia sering kali menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan publik karena dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program di lapangan (Van Meter & Van Horn, 1975). Selain itu, ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga berpotensi membatasi inovasi program apabila tidak diimbangi dengan dukungan pendanaan dari berbagai pemangku kepentingan.

Dari sisi disposisi atau sikap pelaksana, hasil penelitian menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari aparaturnya Dinas P3AKB dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program keluarga berencana. Komitmen tersebut terlihat melalui pelaksanaan penyuluhan kesehatan reproduksi, promosi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), serta peningkatan kapasitas kader di tingkat desa. Sikap positif para pelaksana kebijakan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi program karena pelaksana yang memiliki pemahaman dan komitmen tinggi cenderung mampu menjalankan kebijakan secara lebih efektif (Edwards III,

1980). Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program keluarga berencana di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang ada, tetapi juga oleh dedikasi para pelaksana di lapangan.

Pada aspek struktur birokrasi, penelitian menemukan bahwa pembagian tugas dan fungsi organisasi telah diatur secara jelas melalui regulasi daerah. Kejelasan struktur birokrasi memberikan kepastian mengenai tanggung jawab masing-masing unit kerja sehingga koordinasi antarbagian dapat berjalan lebih efektif. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), struktur organisasi yang jelas akan memudahkan proses implementasi kebijakan karena setiap aktor memahami peran dan kewajibannya. Dengan demikian, keberadaan struktur birokrasi yang terorganisasi menjadi modal penting dalam mendukung keberlanjutan program pengendalian penduduk di Kabupaten Sidoarjo.

Selain berfokus pada pengendalian jumlah penduduk, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa program keluarga berkualitas melalui pendidikan kependudukan telah memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui berbagai kegiatan pelatihan, pendampingan usaha, dan pembinaan kewirausahaan, masyarakat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pendapatan keluarga. Temuan ini mendukung pandangan bahwa program keluarga berencana modern tidak hanya berorientasi pada pengaturan kelahiran, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga secara menyeluruh (BKKBN, 2020). Pendidikan kependudukan menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai hubungan antara kualitas keluarga, kesejahteraan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.

Keberhasilan program pemberdayaan ekonomi melalui rumah kreatif dan pelatihan kewirausahaan menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan keluarga yang terintegrasi mampu memberikan dampak yang lebih luas dibandingkan program yang hanya berfokus pada aspek demografis. Hasil ini sejalan dengan penelitian Safitri dan Mafruhah (2022) yang menyatakan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan dapat mendorong kemandirian ekonomi serta mengurangi kerentanan sosial. Dengan demikian, program keluarga berkualitas yang dilaksanakan oleh Dinas P3AKB tidak hanya berkontribusi terhadap pengendalian penduduk, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat implementasi program. Salah satunya adalah rendahnya partisipasi laki-laki dalam program keluarga berencana, khususnya pada metode kontrasepsi pria. Kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat masih menempatkan tanggung jawab keluarga berencana sebagai urusan perempuan. Temuan tersebut konsisten dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa norma sosial dan budaya masih menjadi tantangan dalam meningkatkan keterlibatan laki-laki dalam kesehatan reproduksi dan keluarga berencana (Kabagenyi et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih inklusif dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pendekatan berbasis keluarga untuk meningkatkan kesadaran laki-laki terhadap pentingnya peran mereka dalam perencanaan keluarga.

Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan jumlah PLKB yang menyebabkan beban kerja petugas menjadi semakin tinggi. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas pendampingan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan penguatan kapasitas kelembagaan melalui penambahan tenaga lapangan, peningkatan kompetensi petugas, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan penyuluhan dan monitoring program.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo dalam pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi program pengendalian penduduk telah berjalan cukup efektif. Keberhasilan tersebut didukung oleh komitmen pelaksana, struktur birokrasi yang jelas, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keluarga berencana dan pendidikan kependudukan. Namun demikian, upaya perbaikan masih diperlukan terutama pada aspek pemerataan komunikasi, penguatan sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi laki-laki dalam program keluarga berencana. Dengan penguatan pada aspek-aspek tersebut, program pengendalian penduduk di Kabupaten Sidoarjo berpotensi memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan keluarga berkualitas dan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan.

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

##### ***Simpulan***

Berdasarkan analisis dan penelitian yang telah dilaksanakan, disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo memainkan peran penting dalam memberdayakan masyarakat melalui pelaksanaan program pengendalian populasi. Peran ini tercermin dalam fungsi mereka sebagai penggerak, pengajar, pemberi semangat, dan pendukung masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta partisipasi mengenai program kependudukan dan keluarga berencana.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian jumlah penduduk, yang dievaluasi menggunakan model pelaksanaan kebijakan George C. Edwards III menunjukkan mengenai elemen-elemen komunikasi, sumber daya, sikap, dan serta birokrasi telah berfungsi dengan baik, meskipun terdapat sejumlah kendala. Komunikasi dengan cara Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dilakukan secara berkesinambungan, namun penyebarannya belum sepenuhnya merata. Dalam hal sumber daya, terbatasnya jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan ketergantungan pada dana dari daerah menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program ini. Sebaliknya, komitmen para pelaksana mencerminkan niat yang cukup besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana, khususnya melalui metode Medis Operasi Pria (MOP), masih tergolong rendah. Struktur birokrasi yang ditentukan secara jelas melalui peraturan daerah memberikan fondasi yang kuat untuk melaksanakan program keluarga berencana.

Selanjutnya, pelaksanaan Program Keluarga Berkualitas melalui Pendidikan Kependudukan telah menunjukkan dampak yang baik dalam meningkatkan

kemampuan dan kemandirian ekonomi keluarga, khususnya bagi keluarga yang menjadi peserta KB. Program ini tidak hanya terfokus pada pengendalian jumlah populasi, tetapi juga memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup keluarga melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan yang berkelanjutan. Namun, masih terdapat tantangan terkait pola pikir masyarakat yang cenderung mengharapkan dukungan keuangan, serta kesulitan dalam mengenali karakter masyarakat yang kurang beruntung, yang membutuhkan pendekatan pemberdayaan yang lebih luwes dan berkelanjutan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil analisis tersebut, berikut adalah beberapa rekomendasi yang bisa diberikan untuk meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan pengendalian populasi di Kabupaten Sidoarjo:

1. Peningkatan Kualitas dan Distribusi Sosialisasi Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo disarankan untuk memperkuat metode sosialisasi dengan memperluas jangkauan komunikasi, memanfaatkan platform digital, serta menciptakan cara sosialisasi yang lebih kreatif dan sesuai dengan karakter masyarakat di setiap daerah.
2. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Organisasi Pemerintah daerah direkomendasikan untuk menambah jumlah petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) sesuai standar yang diharapkan, serta meningkatkan kemampuan petugas melalui pelatihan yang berkelanjutan guna memperbaiki layanan kepada masyarakat.
3. Peningkatan Partisipasi KB Pria Diperlukan fokus yang lebih dalam pada sosialisasi dan pendidikan yang menekankan peran pria dalam program keluarga berencana, terutama mengenai metode Medis Operasi Pria (MOP), dengan keterlibatan pemuka agama, tokoh masyarakat, dan pendekatan berbasis keluarga untuk mengubah pandangan bahwa program KB hanya menjadi tanggung jawab perempuan.
4. Penguatan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Program Keluarga Berkualitas melalui Pendidikan Kependudukan perlu ditingkatkan dengan memperluas akses pelatihan, bimbingan usaha, serta dukungan pemasaran agar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga secara berkelanjutan.
5. Peningkatan Sinergi dan Kerja Sama Dinas P3AKB diharapkan dapat memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan lembaga masyarakat, untuk memperkuat jaringan sosialisasi dan dukungan dalam pelaksanaan program pengendalian populasi.

Dengan langkah-langkah perbaikan dan penguatan ini, diharapkan penerapan kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berkontribusi pada pencapaian keluarga berkualitas serta pembangunan kependudukan yang seimbang.

### **5. DAFTAR PUSTAKA**

Reni Safitri, & Mafruhah, A. Y. (2022). "Efektivitas Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dalam Penurunan Pengangguran di Kota Cimahi".

*Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(2), 470-479.  
<https://doi.org/10.29313/bcses.v2i2.4625>

Ardani, N., Handrian, L., & Lesmana, G. (2025). 684-Article Text-2972-1-10-20250111. 5(1), 1-10.

Janani, M., & Arifin, K. I. (2024). *Menjalankan Program Keluarga Berencana*. 1(2), 8-17.

Febriyanti, N., Sukristyanto, A., & Hariyoko, Y. (2023). Nur+Lisy+Adinda+Febriyanti+1111900017. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(1), 162-172.

Fitria, L., & Riyadh U.B, A. (2024). "Efektivitas Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini di Kabupaten Sidoarjo". *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(5), 1684-1697. <https://doi.org/10.38035/rj.v6i5.995>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2020). *Rencana Strategis Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga*. Jakarta: BKKBN.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework". *Administration & Society*, 6(4), 445-488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>